

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE BERBASIS EVIDENCE BASED POLICY

(Studi di Desa Limpung Kabupaten Batang)

Abdul Mutolib¹, Titik Djumiarti²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407,
Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The *Smart Village* program is a transformation initiative in village governance based on technology and data, aiming to improve public service quality, community empowerment, and local economic growth. In Batang Regency, this policy is regulated by Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning the *Masterplan for Smart City and Smart Village*. However, in Limpung Village as the pilot project, the implementation has not been fully based on valid and well-documented evidence. This study aims to analyze the implementation of the *Smart Village* program based on *Evidence-Based Policy* in Limpung Village and to identify the supporting and inhibiting factors in the use of evidence in the program's execution. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the *Evidence-Based Policy* framework by Nutley, Walter, and Davies (2007), which includes four main dimensions: *evidence*, *organizational capacity*, *leadership and culture*, and *linkages and relationships*. The findings show that the program implementation does not fully reflect the principles of *Evidence-Based Policy*. The *evidence* dimension is weak due to the absence of a systematic documentation system. *Organizational capacity* is limited by low digital literacy and inadequate technology infrastructure. In terms of *leadership and culture*, although there is commitment from the village head, a data-based work culture has not yet been deeply rooted. Meanwhile, *linkages and relationships* remain weak due to the lack of cross-stakeholder collaboration. Therefore, improvement strategies are needed, such as strengthening documentation systems, enhancing digital capacity, and developing participatory collaboration to ensure the *Smart Village* program is implemented effectively, adaptively, and sustainably.

Keywords: Digital Technology, *Evidence-Based Policy*, *Leadership and Culture*,
Policy Implementation, *Smart Village*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Smart City merupakan konsep tata kelola kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Jonathan (2006) melihatnya sebagai integrasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat berbasis TIK, sementara Abdoulevv (2011) menekankan unsur digital, sosial, dan lingkungan. Dradak (2014) menyebutkan efisiensi sumber daya sebagai tujuan utama, dan Hasibuan & Sulaiman dalam Tri & Aindita (2021) menyoroti dampak positif TIK terhadap kenyamanan kota. Kabupaten Batang telah mengadopsi konsep ini sejak 2018 melalui program Gerakan Menuju 100 *Smart City* dengan enam pilar utama: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Maka dari itu *Smart City* dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar yang dapat memberikan kualitas hidup yang baik dan kenyamanan untuk masyarakatnya. *Smart City* merupakan perencanaan, pengelolaan dan penataan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, untuk mendukung masyarakat yang cerdas juga meningkatkan kualitas hidup yang

berkelanjutan. *Smart City* atau kota pintar juga akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kabupaten Batang merupakan daerah yang terus berkembang, dengan mengambil langkah strategis dalam mengadopsi konsep *Smart City* sebagai upaya untuk modernisasi tata kelola pemerintahan. Kabupaten Batang termasuk bagian dari program gerakan menuju 100 *Smart City* sudah dari tahun 2018. Implementasi *Smart City* yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Batang yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*.

Tabel 1.1 Pencapaian Program *Smart City* di Kabupaten Batang Tahun 2022

No.	Program <i>Smart City</i>	Capaian
1.	<i>Smart Governance</i>	89,7 %
2.	<i>Smart Branding</i>	85,7 %
3.	<i>Smart Economy</i>	80 %
4.	<i>Smart Living</i>	83,3 %
5.	<i>Smart Society</i>	83,3 %
7.	<i>Smart Environment</i>	100 %

Sumber: <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9787>, Diakses pada 19 Mei 2025.

Pencapaian program *Smart City* di Kabupaten Batang pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang beragam pada setiap komponennya. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa *Smart Environment* menjadi komponen dengan capaian tertinggi, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan

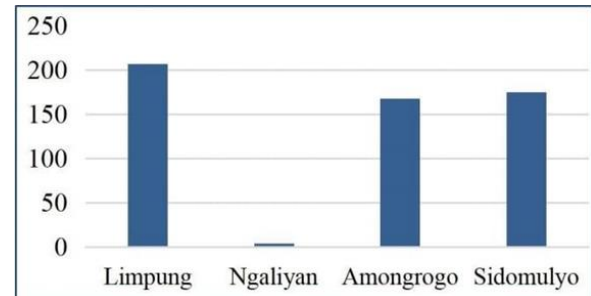
pelaksanaan program yang terkait dengan lingkungan seperti penggalakan *Urban Farming*, pengembangan *Urban Tourism*, serta pembangunan IPAL Komunal dan taman kota. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi yang berorientasi lingkungan.

Pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Batang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak utama. Salah satu kebijakan turunannya adalah Program *Smart Village* yang diatur melalui Peraturan Bupati Batang No. 23 Tahun 2019, yang bertujuan mendorong digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan kemandirian ekonomi lokal. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Desa Limpung yang memiliki sebuah potensi dan juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di banding desa lainya yang ada

di Kecamatan Limpung, seperti pada data di bawah ini:

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Limpung Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2023

Desa Limpung merupakan desa strategis di Kecamatan Limpung yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Letaknya yang berada di jalur utama antar kecamatan serta dekat dengan pusat kota, pasar, dan terminal menjadikannya pusat perdagangan di wilayah Batang Timur. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pelaku industri rumahan seperti emping melinjo yang telah menembus pasar regional. Didukung oleh SDM yang memadai, akses internet, serta potensi ekonomi lokal yang berkembang, Desa Limpung ditetapkan sebagai pilot project program *Smart Village* di Kabupaten Batang.

Program *Smart Village* merupakan turunan dari *Masterplan Smart City* dalam RPJMD Kabupaten Batang 2017–2022, yang mencakup enam dimensi utama seperti *Smart*

Governance, Smart Economy, dan Smart Environment, dengan fokus pada digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal (OVOP), serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Desa Limpung ditetapkan sebagai pilot project sejak 2018 untuk mendorong penerapan kebijakan berbasis data dalam meningkatkan pelayanan publik, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi awal telah dilakukan melalui pemanfaatan *website* desa sebagai pusat informasi serta penggunaan *WhatsApp* untuk pengajuan administrasi, memanfaatkan aplikasi yang telah familiar bagi warga.

Gambar 1.2 Website Desa Limpung



Sumber: <https://limpung.desa.id>. Di akses pada 20 Mei 2025

Meskipun Desa Limpung telah memiliki platform digital seperti website resmi sebagai bentuk awal digitalisasi pelayanan publik, implementasi Program *Smart Village* sejak 2018 masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek *Smart Economy* dan *Smart Environment*. Pemanfaatan teknologi belum optimal dalam

mengangkat potensi desa, dokumentasi program tidak sistematis, partisipasi masyarakat rendah, dan transparansi anggaran belum terwujud. Dalam perspektif Nutley et al. (2007), kebijakan berbasis bukti menuntut penggunaan data yang valid dan terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, ketiadaan sistem dokumentasi dan lemahnya komunikasi antaraktor menunjukkan bahwa prinsip *evidence-based policy* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pelaksanaan program di Desa Limpung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program *Smart Village* Berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan bukti dalam implementasi program *Smart Village* di Desa Limpung?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Program *Smart Village* Berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan bukti dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Desa Limpung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi Program *Smart Village* berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Lokasi penelitian terpusat di Kantor Pemerintah Desa Limpung, dengan subjek penelitian yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Bendahara Desa, serta perwakilan masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Limpung.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terkait aktivitas pelayanan publik dan program *Smart Village*. Wawancara dilakukan terhadap perangkat desa dan masyarakat guna menggali pemahaman, praktik, serta hambatan dalam implementasi kebijakan berbasis bukti di desa.

Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen seperti RPJMD Kabupaten Batang, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019

tentang *Smart City*, *website* resmi limpung.desa.id, proposal program desa, laporan kegiatan, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan Program *Smart Village*.

Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi teknik (melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi), triangulasi sumber (dengan berbagai informan dari perangkat desa hingga masyarakat), serta triangulasi teori, dengan menggunakan kerangka teori *Evidence-Based Policy* dari Nutley et al. (2007) dalam menganalisis temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program *Smart Village* Berbasis *Evidence-Based Policy* di Desa Limpung

Program *Smart Village* di Desa Limpung merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang melalui Perbup No. 23 Tahun 2019. Penelitian ini tidak membahas enam domain program secara sektoral, melainkan menilai implementasinya berdasarkan prinsip *evidence-based policy* menurut Nutley et al. (2007), yang mencakup penggunaan bukti, kapasitas organisasi, kepemimpinan, dan

keterhubungan antar aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

1. *Evidence*

Dalam konteks *evidence-based policy*, penggunaan bukti yang relevan dan terdokumentasi menjadi dasar penting pengambilan keputusan. Namun, di Desa Limpung, dimensi *evidence* belum berjalan optimal. Musyawarah desa rutin dilakukan, tetapi tanpa sistem dokumentasi formal yang memadai. Layanan digital seperti *WhatsApp* dan program OVOP juga belum ditunjang data evaluatif atau basis data terintegrasi. Akibatnya, kebijakan cenderung bersifat teknis dan informal, belum mencerminkan prinsip kebijakan yang reflektif dan berbasis bukti.

2. *Organizational Capacity*

Organizational capacity dalam kerangka *evidence-based policy* menekankan kesiapan institusi dalam mengelola dan memanfaatkan bukti. Di Desa Limpung, kapasitas ini masih rendah, ditandai dengan terbatasnya literasi digital, minimnya pelatihan, serta lemahnya infrastruktur pendukung. Penggunaan teknologi seperti *WhatsApp* belum diiringi kemampuan dokumentasi dan analisis data yang memadai. Anggaran desa pun belum difokuskan untuk memperkuat sistem

informasi atau SDM, sehingga bukti belum menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik.

3. *Leadership and Culture*

Dimensi *leadership and culture* dalam *evidence-based policy* menekankan peran pemimpin dan budaya kerja dalam mendorong penggunaan bukti. Di Desa Limpung, meskipun Kepala Desa menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi dan promosi ekonomi lokal, budaya kerja berbasis data belum terbentuk. Evaluasi bersifat insidental, dokumentasi belum menjadi rutinitas, dan keterbukaan informasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *evidence-based policy* belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam tata kelola desa.

4. *Linkages and Relationships*

Dimensi *linkages and relationships* dalam *evidence-based policy* menekankan pentingnya jejaring antar aktor dalam mendukung penggunaan bukti. Di Desa Limpung, koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti OPD, perguruan tinggi, dan masyarakat masih bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Ketidadaan mekanisme umpan balik dan minimnya kolaborasi lintas sektor menghambat integrasi data serta penguatan kebijakan. Akibatnya, linkages belum

berfungsi sebagai ekosistem bukti yang mendukung implementasi kebijakan berbasis data secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan Bukti dalam Implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung

Pelaksanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) tidak semata bergantung pada regulasi atau teori yang melandasinya, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, kapasitas organisasi, dan dukungan eksternal. Dalam kerangka Nutley et al. (2007), keberhasilan kebijakan berbasis bukti ditentukan oleh empat dimensi utama: kualitas bukti, kapasitas organisasi, kepemimpinan dan budaya kerja, serta relasi antarpemangku kepentingan. Berdasarkan temuan di Desa Limpung, keempat dimensi tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi Program *Smart Village* secara menyeluruh.

1. Ketersediaan Bukti Valid

Meskipun Program *Smart Village* di Desa Limpung didukung oleh Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2019, implementasinya belum sepenuhnya berbasis bukti. Ketiadaan SOP operasional menyebabkan lemahnya dokumentasi, pelaporan, dan pengumpulan data secara sistematis. Keputusan program

masih didasarkan pada pengalaman dan musyawarah, bukan pada data yang terukur dan terdigitalisasi. Akibatnya, perencanaan kegiatan bersifat normatif dan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

2. Kapasitas Perangkat Desa

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi *evidence-based policy* di Desa Limpung. Kompetensi teknis perangkat desa dalam mengelola data dan menyusun laporan masih rendah, sementara pelatihan dari pemerintah kabupaten belum tersedia. Akibatnya, layanan digital belum menghasilkan data yang dapat dijadikan dasar kebijakan, dan penyusunan program masih berbasis rutinitas, bukan analisis kebutuhan yang terukur.

3. Budaya Kerja Berbasis Data

Budaya organisasi di Desa Limpung belum mendukung praktik kebijakan berbasis bukti secara optimal. Meskipun terdapat adopsi kerja digital, kebiasaan kerja perangkat desa masih normatif dan kurang reflektif. Monitoring hanya difokuskan pada pelaksanaan tanpa evaluasi berbasis data, dan keputusan kerap diambil berdasarkan intuisi, bukan bukti yang valid. Ketiadaan pelaporan terstruktur dan forum evaluatif menunjukkan bahwa budaya kerja belum menginternalisasi prinsip *evidence-based policy*, sehingga

perencanaan dan anggaran berisiko tidak tepat sasaran.

4. Sistem Dokumentasi

Ketiadaan sistem dokumentasi yang terstruktur dan digital menjadi hambatan krusial dalam penerapan *evidence-based policy* di Desa Limpung. Kegiatan desa tidak tercatat secara formal, tidak memiliki basis data, dan tidak ada mekanisme pelacakan progres. Hal ini menyulitkan evaluasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam kerangka Nutley et al. (2007), lemahnya dokumentasi mencerminkan minimnya fondasi internal untuk mendukung penggunaan bukti yang valid dan berkelanjutan.

5. Infrastruktur Tterbatas

Keterbatasan infrastruktur digital di Desa Limpung, seperti akses internet yang tidak stabil dan minimnya perangkat serta sistem informasi, menjadi hambatan utama dalam praktik *evidence-based policy*. Proses administrasi masih manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat pengumpulan serta pemanfaatan data. Dalam kerangka Nutley et al. (2007), kondisi ini mencerminkan rendahnya kapasitas organisasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti secara efektif.

6. Kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung masih lemah, baik di tingkat internal desa maupun dengan pihak eksternal seperti OPD dan perguruan tinggi. Forum musyawarah cenderung bersifat formal tanpa tindak lanjut atau integrasi data. Minimnya kolaborasi ini menyebabkan proses perumusan kebijakan berlangsung secara sektoral dan tidak berbasis bukti. Dalam kerangka Nutley et al. (2007), lemahnya *linkages and relationships* menghambat terciptanya kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung yang dianalisis menggunakan pendekatan *evidence-based policy* menurut Nutley, Walter, dan Davies (2007), dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *evidence-based policy*.

Meskipun didukung Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2019, pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Limpung belum berbasis bukti secara optimal. Keempat dimensi dalam *evidence-based policy: evidence, organizational capacity, leadership and culture*, serta *linkages and relationships* masih mengalami hambatan. Bukti tidak terdokumentasi dengan baik, kapasitas organisasi terbatas oleh minimnya pelatihan dan infrastruktur, budaya kerja belum reflektif, dan kolaborasi antaraktor belum terbangun secara aktif.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sangat menentukan keberhasilan penerapan *evidence-based policy* dalam program *Smart Village*.

Faktor pendukung implementasi Program *Smart Village* di Desa Limpung meliputi adanya dasar hukum melalui Perbup No. 23 Tahun 2019 dan inisiatif perangkat desa dalam digitalisasi layanan. Namun, hambatan struktural dan teknis seperti rendahnya kapasitas SDM, budaya kerja yang belum berbasis data, lemahnya dokumentasi, terbatasnya infrastruktur digital, serta kurangnya koordinasi lintas aktor, menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis sistem kebijakan yang kuat. Akibatnya, efektivitas

program masih bergantung pada inisiatif individu, bukan sistem kelembagaan.

Saran

1. Penguatan sistem kebijakan berbasis bukti harus dimulai dari pembenahan sistem dokumentasi dan kapasitas internal desa.

Pemerintah Desa perlu menyusun SOP turunan dari Perbup No. 23 Tahun 2019, memperkuat pelatihan literasi digital dan manajemen data, serta membangun sistem dokumentasi yang terstruktur. Pembentukan tim pengelola data lintas bidang juga penting agar penggunaan bukti menjadi bagian dari sistem kelembagaan, bukan sekadar inisiatif individu.

2. Perlu dibangun ekosistem kolaboratif yang mendukung integrasi bukti dalam proses kebijakan secara lintas-aktor.

Pemerintah Desa Limpung perlu menjalin kemitraan aktif dengan dinas kabupaten, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat melalui forum komunikasi lintas aktor. Forum ini dapat menjadi ruang berbagi data dan refleksi kebijakan, guna memperkuat *linkages and relationships* serta mendorong perumusan program yang kolaboratif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Alhari, M. I., Febriyani, W., & Fajrillah, A. A. N. (2022, July). Meta-Analysis

- and Systematic Review: A Strategy and Dimension to Achieve of Smart Village Concept. In *2022 4th International Conference on Smart Sensors and Application (ICSSA)* (pp. 90-95). IEEE.
- Ati, R. (2023). Pemanfaatan *Smart Village* Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Desa Poncowarno. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 47-52.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide of Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (4th ed.). CQ Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kecamatan Limpung dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Batang.
- Chatterje, R., & Kar, A. K. (2017). *Smart Cities in Developing Economies: A Literature Review and Policy Insight. Telematics and Informatics*, 34(7), 1670-1681.
- Chowdhury, M. R., Sourav, M. S. U., & Sulaiman, R. B. (2023). The Role of Digital Agriculture in Transforming Rural Areas Into Smart Villages. In *Technology and Talent Strategies for Sustainable Smart Cities: Digital Futures* (pp. 57-78). Emerald Publishing Limited.
- Degada, A., Thapliyal, H., & Mohanty, S. P. (2021, June). Smart village: An iot based digital transformation. In *2021 IEEE 7th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)* (pp. 459-463). IEEE.
- Dian, K. (2024). Kolaborasi Aktor Heptahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Smart Village di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dwidjowijoto, R. (2003). *Manajemen Kebijakan Publik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). "The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a triple Helix of University-Industry-Government Relations." *Reserch Policy*, 29(2), 109-123.
- European Network for Rural Development. (2018). "Smart Villages: Revitalising Rural Services through Digital and Social Innovation."
- Fitriasari, E. T. (2023). Akselerasi Kota dan Desa Cerdas Berkelanjutan. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45-56.
- Gill-Gracia, J. R., T. A., & Nam, T. (2015). *What Makes a City Smart? Identifying Core Components and Proporsing an Integrative Framwork. Information Polity*, 20(1), 61-87.
- Gleaser, E. L, & Berry, C. R. (2006). *Why Are Smart Place Getting Smarter? Taubman Center Policy Biefs*.
- Hambleton, R. (2015). *Place-Based Leadership: A New Perpective on Urban Governance. Cities* 42(1), 92-94.
- Haniyuhana, A., & Wicaksono, A. S. (2023). Analisis pengembangan komponen smart village di Desa Limpung. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 1-6.

- Head, B. W. (2010). "Reconsidering Evidence-based Policy: Key Issue and Challenges." *Policy and Society*, 29(2), 77-94.
- Henriyani, E. (2019). Program inovasi desa; antara peluang dan tantangan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 66- 70.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kantor Camat Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur Mohamad Arsad Rahawarin Universitas Pattimura Ambon.
- Ismiati, Indri. (2024). Pengaruh *Good Governance* Desa terhadap *Smart Village* Indonesia.
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif *Evidence Based Policy*. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167-178.
- Julnarta, S. (2023). *Pola Komunikasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Smart Village di Kelurahan Pleret Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD").
- Kahfi, MM, Asmawi, MR, & Utami, P. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Internasional Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Lain-lain*, 6 (3), 228-238.
- Kaloka, R A., Kurniasih, H., & Agustiani, H. A. (2021). Penerapan aplikasi sipintar sebagai media komunikasi dalam upaya mewujudkan *smart village* di desa kalisalak kec. Limpung kabupaten batang. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 5(2), 09-16
- Kecamatan Limpung Dalam Angka 2022
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Setrategi Transformasi dalam Pembangunan Desa Cerdas di Indonesia*.
- Kharisma, I. (2024). Implementasi Konsep *Smart Village* di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Meijer, A., & Bolivar, M. P. R. (2016). *Governing the Smart City: A Riview of the literature on Smart Urban Governance. International Riview of Administrative Sciences*, 82(2), 392-408.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Implementasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Service*. Bristol: Policy Press.
- OECD. (2020). *Smart Cities and Inclusive Growth*. OECD Publishing.
- Oktaviana, R. N. (2024). Implementasi *Smart Village* (Smart Living dan Smart Economy) di Desa Pangandaran, Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- Parsons, W. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* Edwar Elgar.
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Y., ... & Teri, T. (2020). Aplikasi teknologi informasi: teori dan implementasi.
- Putri, A., Rahayu, D., & Dwisnu, E. (2024). Program Smart Village: Tantangan Implementasi di Era Digitalisasi. *Jurnal Pemerintahan*, 10 (1), 41-54.
- Ramachandra, T, V., Aithal, B, H., & Sreejith, K. (2015). *Smart Villages: The Need of the Future. International Journal of Research in Engineering and Technology*, 4(3), 2321-7308.
- Ramadanti, V. (2020). Kebijakan berbasis bukti (based policy evidence) dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada BAPPEDA Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Univaersitas Negeri Makassar).
- RI, B. K. D. (2020). Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa.
- RPJMD Kabupaten Batang 2019-2022
- Saifuddin, R. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 183-183.
- Sari, N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Peran Pemerintah Desa Pargartun) *jurnal LPPM*, 12(1A), 27-35.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- Shabriani ati, A., & Yuliastuti, N. (2020). Penerapan Konsep Smart Village Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Batang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sujadi, T. (2020). *Impleentasi Kebijakan Smart Village dalam Pembangunan Desa Berbasis Digital di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 145-160.
- Sutopo, H. B., & Arif, A. I. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasinya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Wibawa, S., Thohari, I., & Probowo, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik: Teori, Model, dan Aplikasi*. Gava Media.
- Zahra, Z. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Smart Village di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.